Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, November 2024, 10 (22), 561-577
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.14569001.
p-ISSN: 2622-8327 e-ISSN: 2089-5364
Accredited by Directorate General of Strengthening for Research and Development
Available online at https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP

Problematika Subjek Hukum Hak Cipta Terkait Status "Pencipta" Atas Hasil Artificial Intelligence

Gladys Azalia Christi[1] , Diana Tantri Cahyaningsih[2]

[1,2] Universitas Sebelas Maret

Received: 08 November 2024
Revised : 15 November 2024
Accepted: 21 November 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Artificial Intelligence sebagai subjek hukum dalam Hukum Nasional Indonesia dan mengetahui status hak cipta atas hasil Artificial Intelligence. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dimana penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penulis menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hukum nasional, AI tidak dapat dikatakan sebagai subjek hukum karena AI hanya menjalankan perintah dari manusia dan tidak dapat dipersonifikasikan sebagai manusia yang memiliki kecakapan hukum. Akan tetapi, AI dapat disamakan dengan kedudukan badan hukum yang juga dinyatakan sebagai subjek hukum, karena perkembangan AI akan menciptakan suatu era yang berdampak besar bagi kehidupan manusia. Kemudian hasil karya AI jika ditinjau dari UU Hak Cipta, tidak mendapatkan perlindungan hak cipta karena secara yuridis bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan secara teoretis bertentangan dengan teori kekayaan intelektual. Kendati demikian, Indonesia dapat mengadopsi pendekatan yang dilakukan di Uni Eropa yakni pendekatan berbasis desain yang dikombinasikan dengan interpretasi kreativitas perancang. Sehingga untuk menentukan apakah suatu hasil karya AI dapat dilindungi oleh hak cipta, harus dinilai sejauh mana kontribusi pengguna terhadap penyempurnaan karya tersebut.

Keywords: *Artificial Intelligence, hak cipta, pencipta, subjek hukum*

(*) Corresponding Author: gladysazalia57@gmail.com

How to Cite: Christi, G. A., & Cahyaningsih, D. T. (2024). Problematika Subjek Hukum Hak Cipta Terkait Status "Pencipta" Atas Hasil Artificial Intelligence. https://doi.org/10.5281/zenodo.14569001.

PENDAHULUAN

Kecerdasan Intelektual adalah salah satu anugerah yang diberikan oleh Tuhan pada tiap manusia. Tuhan memberikan peluang sekaligus ruang pada manusia untuk dapat melakukan pengembangan diri dalam berbagai konsep yakni otonomi, kreativitas, dan indepedensi sebagai pertahanan diri (*survive*) dan mengembangkan kehidupannya (Sukarno Aburarea, dkk., 2013). Perkembangan sejarah Kekayaan Intelektual telah dimulai sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. Peradaban manusia dilahirkan sekaligus dibangun berlandaskan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi (Saidin, 2015). Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya penemuan besar yang pada jaman dahulu pernah dilakukan oleh beberapa ilmuan terdahulu. Pada masa tersebut telah diatur mengenai Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Menurut (World Intellectual Property Organization (WIPO) Copyright Treaty , 1988) kekayaan intelektual diklasifikasikan menjadi dua yakni Hak Cipta (*copyright*) dan Hak Kekayaan Perindustrian (*Industrial Property Rights*). Namun, terdapat pengelompokan lagi di dalam Hak Cipta yakni Hak Cipta dan Hak Terkait

(*neighbouring rights*). Hak cipta memberikan hak milik secara eksklusif atas suatu karya ciptaan yakni dengan cara tiap orang lain yang akan/ingin melakukan perbuatan untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaan, wajib meminta izin terlebih dahulu pada pemilik yang berkedudukan sebagai pemegang hak cipta melalui perjanjian (Kansil, 2002). Hak Cipta (*copyrights*) mengandung hak-hak ekonomi (*economic rights*) dan hak-hak moral (*moral rights*).

Seiring dengan perkembangan zaman, terjadi proses percepatan arus globalisasi yang mengakibatkan adanya perubahan secara signifikan di dalam peradaban manusia. Dimana kondisi ini menyebabkan manusia sekarang hidup di zaman kemajuan teknologi yang sangat pesat, sehingga mulai banyak munculnya pekerjaan yang dapat digantikan oleh mesin cerdas (Cholik, 2021). Peradaban pada era *society* 5.0 telah memposisikan manusia dan teknologi secara beriringan dengan tujuan meningkatkan kualitas taraf hidup manusia berkelanjutan. Hal ini terlihat ketika *Artificial Intelligence* lahir dan masuk kedalam aspek kehidupan manusia dengan cara yang menakjubkan ia dapat mengerjakan pekerjaan manusia dengan pengetahuan khusus dan lisensi yang dikeluarkan oleh pemerintah (González Otero, 2018). *Artificial Intelligence* pertama kali lahir dari seorang ilmuwan komputer Amerika bernama John McCarthy di tahun 1956 pada seminar di *Dartmouth College* (McCarthy, 2007). Dilatarbelakangi oleh keterbatasan yang dimiliki oleh manusia dalam mengambil sebuah keputusan, menyebabkan *Artificial Intelligence* banyak diciptakan karena keputusan yang dihasilkan tidak didasarkan pada unsur emosional, melainkan menggunakan data. *Artificial Intelligence* berbeda dengan tenaga kerja manusia meskipun ia dapat mengerjakan pekerjaan manusia. Ia tidak memerlukan insentif dan tidak bergantung pada penyediaan imbalan bagi karyawan untuk bekerja, melainkan hanya membutuhkan data dan proses agar dapat berfungsi dengan baik (Yamashita, 2021).

Kepemilikan kekayaan intelektual di Indonesia diatur dalam sejumlah undang-undang dan peraturan yang berbeda. Namun, belum ada peraturan yang secara khusus mengatur mengenai *Artificial Intelligence* sebagai objek kekayaan intelektual apapun. Berdasarkan survei *Artificial Intelligence Adoption Survey* oleh *International Data Corporation* (IDC) pada tahun 2017 mengindikasikan bahwa penggunaan *Artificial Intelligence* di Indonesia telah mencapai 24,6% dan terus meningkat hingga saat ini. Hasilnya, Indonesia kini menjadi salah satu negara di ASEAN dengan peringkat tertinggi untuk adopsi *Artificial Intelligence*, diikuti oleh Thailand sebagai negara di posisi kedua. Mayoritas masyarakat setuju bahwa *Artificial Intelligence* memberikan banyak manfaat dan dapat membantu pekerjaan mereka sehari-hari. Manfaat penggunaan *Artificial Intelligene* lebih banyak digunakan dalam dunia bisnis global. Hal tersebut tercatat dalam laporan survei McKinsey yang berjudul *The State of Artificial Intelligence in 2022*. Dari 1.492 jumlah responden survei global, di tahun 2022 terdapat 50% yang telah mengadopsi/menggunakan *Artificial Intelligence* dalam minimal satu unit bisnis yang sedang mereka jalani. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebanyak lebih dari dua kali lipat dari tahun 2017, yang pada saat itu pengguna *Artificial Intelligence* masih berada dalam presentase 20%.

Hadirnya *Artificial Intelligence* sangat membuka peluang untuk seseorang dapat membuat produk baru. Salah satu teknologi *Artificial Intelligence* yang dapat menghasilkan produk baru yaitu AI *Art Generator Maker*. Penggunaan teknologi

tersebut menjadi kontroversi bagi Seniman Digital Indonesia. Dilansir dari VOA Indonesia (29/09/2023), seorang komikus komik Marvel yang bernama Ario Anindito menilai bahwa adanya AI *Art Generator Maker* dapat merugikan artis atau seniman lain. Dapat dikatakan demikian karena AI *Art Generator Maker* mengambil *style* dari artis yang telah ada. Namun, artis tersebut tidak pernah memberikan izin secara konsensual untuk gayanya dipakai dalam *generating* AI *Image*. Kedua, banyak pihak yang saat ini menjual hasil karya lukisan *Artificial Intelligence* di *platform Etsy* yang merupakan *marketplace* khusus pembeli bisnis kecil untuk menjual karya seni hasil tangan mereka kepada pembeli di seluruh negara. Praktik jual beli hasil lukisan AI *Art Generator Maker* ini dapat dapat menurunkan secara drastis pendapatan para seniman karena penjualan lukisan karya *Artificial Intelligence* dapat merusak harga pasar mereka. . Kasus serupa terjadi di Inggris yakni kasus "*Paintings Generated by Artificial Intelligence*" yang diputuskan oleh *High Court of England and Wales* pada tahun 2018. Kasus tersebut sempat menjadi kasus yang terkenal di Inggris karena dalam kasus ini sebuah kelompok seniman menggunakan algoritma *Artificial Intelligence* untuk membuat lukisan, yang kemudian dipamerkan dan dijual. Kasus lain yang berhubungan dengan hasil karya *Artificial Intelligence* di Eropa adalah "*Next Rembrand*", dimana sekelompok seniman, insinyur, dan ilmuwan menggunakan algoritme pembelajaran mesin untuk membuat lukisan baru dengan gaya *Rembrandt*. Lukisan tersebut dipamerkan dan dijual, dan muncul pertanyaan siapa yang memiliki hak cipta dalam karya tersebut.

Adanya beberapa kasus yang terjadi di Eropa diatas, pada bulan Oktober tahun 2020, *The European Parliament* mengadopsi resolusi tentang hak kekayaan intelektual untuk pengembangan teknologi kecerdasan buatan, yang didasarkan pada rekomendasi yang dibuat dalam *the European Commision's 2019 report* (European Parliament, 2020). Resolusi tersebut mengakui perlunya kerangka hukum terkait dengan tantangan yang ditimbulkan atas karya yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence*, termasuk hak cipta kepemilikan, kewajiban, dan akuntabilitas. Uni Eropa juga telah mengusulkan regulasi terkait *Artificial Intelligence Act* (selanjutnya disebut AIA), yang dirilis pada bulan April tahun 2021. AIA berupaya untuk mengatur pengembangan dan penyebaran teknologi *Artificial Intelligence* di Uni Eropa, dengan berfokus pada keamanan serta hak-hak dasar warga negara Uni Eropa (European Commission, 2021). AIA juga mengatur mengenai ketentuan hak kekayaan intelektual, yang selaras dengan *European Commision's 2019 report and the European Resolution* (European Parliament, 2020). Dengan berkembangnya penggunaan *Artificial Intelligence* di Indonesia, hal itu perlu diselaraskan dengan tersedianya regulasi yang mengatur mengenai perlindungan penggunaan *Artificial Intelligence* khususnya dalam aspek Hak Kekayaan Intelektual. Sayangnya, saat ini Indonesia belum memiliki regulasi tersebut. McKinsey & Company berpendapat bahwasanya Indonesia memerlukan strategi proaktif dalam mengimplementasikan teknologi *Artificial Intelligence* yang melibatkan semua pemangku kepentingan agar dapat bersaing di pasar global dan ASEAN (Dwivedi, dkk., 2021). Di Uni Eropa sendiri telah menjadi negara yang telah mengembangkan undang-undang dan kebijakan untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh *Artificial Intelligence* di berbagai sektor, termasuk kekayaan intelektual (Zhuk, 2023). Penting bagi sebuah negara untuk dapat memberikan

kepastian hukum terhadap status ciptaan atas karya *Artificial Intelligence* dan mengatur mengenai siapa yang berhak atas karya tersebut. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahas mengenai dua permasalahan yakni: 1) bagaimana kedudukan *Artificial Intelligence* sebagai subjek hukum dalam Hukum Nasional Indonesia dan 2) bagaimana status hak cipta atas hasil *Artificial Intelligence*?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian normatif menurut Peter Mahmud adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan (Marzuki, 2019). Ditinjau dari sifat penelitiannya, maka penelitian ini tergolong kedalam penelitian yang bersifat preskriptif. Hal ini mengacu pada pengertian penelitian itu sendiri yang merupakan sebuah penelitian yang dilakukan untuk menemukan hukum guna menjawab bentuk isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter atau sifat preskripsi ilmu hukum (Marzuki, 2019). Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual* approach), pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang memiliki dua jenis sumber hukum yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi selama membuat peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi hukum tersebut meliputi buku-buku teks termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan (Marzuki, 2019). Dalam penelitian ini, untuk memperoleh sumber yang relevan, diperlukan pengumpulan bahan hukum dengan teknik studi kepustakaan atau studi dokumen (*library research*). Jika menilik lebih jauh terhadap pendekatan yang dilakukan oleh penulis yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) maka dalam hal ini penulis mengumpulkan bahan hukum dengan menulis peraturan perundang-undangan terkait isu hukum tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perdebatan mengenai Kedudukan *Artificial Intelligence* sebagai Subjek Hukum dalam Hukum Nasional Indonesia

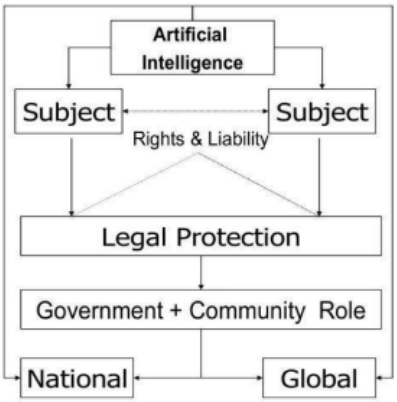
Kecerdasan buatan atau yang biasa dikenal dalam istilah AI (*Artificial Intelligence*) memiliki makna *artificial* yang berarti buatan dan *intelligence* adalah kata sifat yang menunjukkan arti cerdas (Anggia Dasa Putri dan Dapit Pratama, 2017). Sama seperti maknanya, AI diciptakan untuk menjadi pintar dan cerdas agar dapat melakukan tugas yang dilakukan oleh manusia dengan meniru proses kerja otak manusia baik dalam hal penalaran, pemikiran, pengetahuan, pemahaman bahasa, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah (Kusumawati, 2008). Dengan proses masukan data yang diberikan oleh manusia, memungkinkan

teknologi AI untuk menggunakan pengetahuannya dalam berpikir seperti manusia sehingga dapat memecahkan permasaahan yang ada. Meski tidak sepenuhnya memiliki kecerdasan manusia, namun melalui usaha yang diberikan, AI dapat memperolah pengetahuan yang dibutuhkannya (Kusumawati, 2008). Sehingga dapat disimpulkan bahwa AI diciptakan sedemikian rupa dengan tujuan agar setara dengan manusia bahkan bisa melebihi manusia dalam membantu sekaligus pengganti manusia untuk melakukan suatu tindakan. Salah satu dasar hukum yang mengatur tentang teknologi secara khusus adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). UU ITE berisikan mengenai solusi untuk segala permasalahan yang berkaitan dengan teknologi. Akan tetapi, UU ITE tidak mejelaskan secara khusus/signifikan mengenai AI. Jika AI dikorelasikan dengan UU ITE, maka AI hanya diklasifikasikan sebagai Informasi Elektronik. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 UU ITE yang berbunyi:

"Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."

Dilanjut pada Pasal 1 Angka 2 UU ITE yang menjelaskan mengenai pengertian Transaksi Elektronik yakni perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Berdasarkan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya dalam melakukan tindakan dan perbuatannya, AI hanya menjalankan perintah dari manusia sehingga ia tidak dapat dikatakan sebagai subjek hukum (Muhammad Tan Abdul Rahman Haris dan Tantimin, 2022). Hal ini diperkuat oleh UU ITE mengatur yang dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yakni hanyalah a) Pengirim, b) Penerima, c) Orang, d) Badan Usaha, e) Pemerintah. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (WAMENKUMHAM) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan bahwa sulit untuk menggolongkan AI dalam kategori subjek hukum. Hal tersebut dilandasi karena AI tidak dapat dipersonifikasikan sebagai manusia yang memiliki kecakapan hukum, kewenangan, mengemban hak, dan kewajiban. Proses kerja AI itu sendiri merupakan masukan dari *progammer*, yang mana *progammer* tersebut adalah manusia (Ratna Puspita, 2021). Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (selanjutnya disebut BPPT) juga mengkaji bahwa AI tidak dapat dikatakan sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, karena teknologi AI merupakan produk teknologi yang diciptakan oleh manusia. Kerangka dari kajian hukum teknologi yang berkaitan dengan Kecerdasan Artifisial/AI dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1. Kerangka Kajian Hukum Teknologi Kecerdasan Artifisial



Sumber: BPPT 2020

Berdasarkan gambar diatas dapat kita lihat bahwasanya AI tidak dapat dikatakan sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Perlindungan hukum terhadap subjek hukum (manusia dan badan hukum yang dibentuk oleh manusia) ditentukan oleh presentase partisipasi aktif peran pemerintah dan komunitas pada penerapan tersebut. Hal itu dianalisa mengenai seberapa berpengaruh dampak kebijakan di lingkup nasional dan global terhadap AI. Penjelasan diatas dapat memberikan pemahaman bahwa segala sesuatu yang dapat dinyatakan sebagai subjek hukum atau tidak ditentukan oleh hukum yang berlaku. Begitu pula dengan AI, sama seperti subjek hukum lainnya bahwa hak dan kewajiban AI perlu diatur oleh norma hukum. Sedangkan saat ini belum ada norma hukum yang mengatur secara khusus mengenai AI itu sendiri. Suatu penciptaan dan pengembangan konsep dari subjek filosofis untuk dapat dikatakan menjadi subjek hukum ditentukan berdasarkan manusia, yang bukan hanya sebagai evolusi metafisika, tetapi juga proses realitas historis dan praktis untuk mencerminkan posisi unik manusia ekslusif di dunia. Sehingga meskipun kecerdasan buatan sangat dalam dan mempengaruhi kehidupan sosial manusia, masih belum dapat memberikan alasan yang cukup untuk menjadi subjek hukum yang sama dengan manusia (Zhifeng Wen dan Deyi Tong, 2023).

Dari analisa diatas, menunjukkan bahwa tidak dapat dibuktikan jika algoritma kecerdasan buatan dapat sepenuhnya sama dengan rasionalitas manusia dan tidak bisa dibuktikan bahwa otonomi AI tidak bergantung pada manusia dalam situasi dan kondisi tertentu yang merupakan ekspresi dari kehendak bebas. Oleh karena itu, kecerdasan buatan tidak dapat menjadi subjek hukum asli yang sama dengan manusia. Kendati demikian, menurut pendapat Itok Dwi Kurniawan dan Kristiyadi dalam penelitiannya yang berjudul "*Questioning the Existence of Artificial Intelligence as a Legal Subject in Indonesian National Law*" meskipun AI tidak dapat disamakan persis dengan manusia secara keseluruhan karena AI tidak memiliki sifat humanis seperti manusia, AI dapat disamakan dengan kedudukan badan hukum yang juga dinyatakan sebagai subjek hukum (Itok Dwi Kurniawan dan Kristiyadi, 2022). Badan hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum non manusia. Sebagai subjek hukum, badan hukum mempunyai kemampuan untuk melakukan tindakan hukum atau perbuatan hakim (Soemadiningrat, 2000). AI lebih cocok jika disamakan dengan subjek hukum badan hukum daripada dibandingkan dengan hukum manusia sehingga AI dapat

disebut sebagai pendukung hak dan yang dapat melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum.

Hingga saat ini, pertanyaan apakah AI dapat dikatakan sebagai subjek hukum masih menjadi perdebatan di dunia internasional karena memang belum ada konsensus global yang jelas mengenai status hukum entitas non-manusia. Salah satunya yakni Uni Eropa yang belum secara resmi mengakui AI berkedudukan sebagai subjek hukum (Zhuk, 2023). Meski demikian, saat ini Uni Eropa telah bekerja untuk mengadopsi regulasi yang mengatr penggunaan dan perkembangan AI secara khusus melalui *Artificial Intelligence Act* 2023 (selanjutnya disebut AIA). AIA memiliki beberapa tujuan khusus yakni: (i) memastikan bahwa sistem AI yang ditempatkan di Uni Eropa dapat berjalan dengan aman dan menghormati hukum Uni Eropa, (ii) memastikan kepastian hukum untuk memfasilitasi investasi dan inovasi dalam AI, (iii) meningkatkan tata kelola penegakan hukum Uni Eropa yang efektik, fundamental, dan berisikan kepastian hukum mengenai persyaratan keselamatan yang berlaku untuk sistem AI, dan (iv) memfasilitasi pengembangan paar tunggal untuk teknologi AI secara sah, aman, dapat dipercaya, serta mencegah fragmantasi pasar (European Comission , 2021). Peraturan hukum baru mengenai AI, dilandaskan berdasarkan Pasal 1149 dan 1610 dari *Treaty on the Functioning of the European Union* (TFEU) yang akan mendefinisikan AI sebagai teknologi yang netral dan mengadopsi pendekatan berbasis resiko dengan menetapkan persyaratn dan kewajiban berbeda untuk pengembangan, penempatan di pasar, dan penggunaan sistem AI di Uni Eropa (Rouck, 2019).

Menurut pendapat Zhifeng Wen dan Deyi Tong dalam penelitiannya yang berjudul "*Analysis of the Legal Subject Status of Artificial* Intelligence" ia mengatakan bahwa perkembangan AI merupakan posisi antroposentrisme hukum yang adalah prinsip dasar yang harus dipegang teguh pada saat berpikir tentang status subjek hukum kecerdasan buatan (Zhifeng Wen dan Deyi Tong, 2023). Antroposentrisme di bidang metafisika memaksimalkan konsolidasi manusia sebagai matriks doktrinal, berdiri di dunia untuk menjadikan diri mereka sendri sebagai sumber makna, dan menjadikan akal sebagai otoritas kehendak bebas. Berdasarkan aturan AIA yang telah diadopsi oleh Uni Eropa memberikan suatu kesimpulan bagi penulis bahwasanya tanggung jawab hukum atas perbuatan perlu dipelajari dengan baik. Meskipun AI belum memiliki status kedudukan hukum secara jelas, namun perlu adanya kepastian hukum mengenai batasan penggunaan AI hingga pertanggungjawaban terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh AI. Sama seperti badan hukum karena penganggung jawabnya adalah direktur perusahaan atau ketua yayasan, sehingga terdapat pihak-pihak penting yang tidak dapat dikesampingkan yakni pencipta teknologi AI itu sendiri. Pencipta AI harus ikut bertanggungjawab atas tindakan hukum yang dilakukan oleh teknologi yang telah dibuatnya. Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatannya atau terdapat kesengajaan dalam hal pembuatan *alghoritm* AI yang merugikan orang lain tanpa kesadaran pengguna yang tidak memiliki cukup ilmu pengetahuan tentang teknologi AI maka Pengguna AI akan dirugikan. Maka dari itu, poin utama apakah kecerdasan buatan dapat menjadi subjek hukum bukanlah apakah AI dapat diberikan hak dan kewajiban, tetapi apakah AI harus diberikan hak dan kewajiban karena hal itu belum tentu sejalan dengan tujuan akhir dari kepentingan manusia

dalam jangka panjang, sementara nilai inti manusia sebagai subjek hukum tidak dapat diganggu gugat (Guo, 2019).

B. Problematika Subjek Hukum Hak Cipta terkait Status Pencipta Atas Hasil *Artificial Intelligence*

Peraturan mengenai hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta) yang menggantikan Undang-Undang No. 19 Tahun 2022. Regulasi hak cipta yang baru ini disahkan sebagai jawaban dari respon pemerintah terhadap perkembangan industri dan teknologi digital. Jika ditelaah secara teknis, penormaan yang melekat dalam UU Hak Cipta secara meluas lebih mengarah pada kepentingan pencipta atau pemegang ciptaan atau hak terkait yang dijabarkan secara jelas dan merinci. Dapat dilihat pada Pasal 3 UU Hak Cipta bahwa regulasi tersebut mengatur 2 (dua) hak yakni hak cipta dan hak terkait. Sehubungan dengan pembagian pembahasan kedua hak tersebut, pada ketentuan Pasal 4 hingga Pasal 7 mengatur mengenai hak moral secara rinci. Ketentuan Pasal 8 hingga Pasal 19 mengatur mengenai hak ekonomi, dan Pasal 20 hingga Pasal 30 mengatur hak terkait (Riswandi, 2016:108) . Terdapat perbedaan dalam hak moral dan hak ekonomi, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (2) definisi dari hak moral yaitu hak yang melekat secara pribadi dan tidak dapat dialihkan/diberikan pada selain Pencipta selama Pencipta masih hidup. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.

Adanya perkembangan teknologi digital saat ini membuat manusia kerap menggunakan bantuan teknologi dalam proses pembuatan sebuah karya, salah satunya yaitu teknologi AI. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada dasarnya AI merupakan sebuah algoritma yang dapat memproses kumpulan data sehingga pola atau prediksi dari suatu masalah dapat diperoleh. AI memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk menghasilkan sebuah karya baru. Tentu saja hal tersebut harus sejalan dengan harmonisasi regulasi hak cipta di Indonesia, karena dalam penggunaannya banyak berpotensi melanggar hak ekslusif Pencipta. Salah satu contoh kasusnya yaitu lukisan "*The Next Rembrandt*" yang dihasilkan oleh program AI dengan menggunakan *generative models* yang menganalisis 346 lukisan karya Rembrandt (Gema, 2022). Kasus ini dinilai melanggar hak cipta karena jelas melakukan tindakan yang hanya boleh dilakukan oleh Pencipta dan/atau Pemegang Hak Ciptanya. Dengan adanya kasus tersebut menyebabkan nilai legalitas dari karya hasil AI perlu dipertanyakan karena bersifat kontradiktif dengan makna perlindungan karya cipta dalam UU Hak Cipta yang kemudian akan merugikan Pencipta dan/atau Pemegang Hak Ciptanya. Maka dari itu, penulis mengklasifikasikan dalam 3 (tiga) tahapan untuk memperdalam legalitas hasil karya AI yang dianalisa berdasarkan UU Hak Cipta:

1. Bentuk Karya yang Diciptakan/Dihasilkan

Dilihat dari Pasal 1 Angka 3 UU Hak Cipta mendefinisikan bahwa jenis karya cipta yang dilindungi adalah semua hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Akan tetapi, UU Hak Cipta juga memberikan batasan/pengecualian terhadap hasil karya yang tidak dilindungi oleh undang-undang tersebut yang dituangkan kedalam Pasal 41. Pasal tersebut menuliskan bawasanya hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata tidak dapat dilindungi oleh hak cipta. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan

bahwa salah satu karya seni AI yang berjudul *The Next Rembrandt* dan karya sinematografi AI dengan judul *Sunpring* dapat tergolong dalam hasil karya yang dapat dilindungi oleh UU Hak Cipta karena sudah diwujudkan dalam bentuk nyata. Dengan adanya ketentuan pengecualian pada jenis hasil karya yang dilindungi hak cipta dan ditelaah dari definisi Ciptaan pada dasarnya hal itu tidak menghalangi hasil karya AI untuk mendapatkan sebuah perlindungan hak cipta. Kendati demikian, perlu dilakukan peninjauan secara holistik dengan mengedepankan aspek hukum lain. Jika kita perhatikan kembali, pada frasa "…*inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan*" yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 3 UU Hak Cipta memberikan makna tersirat bahwa lahirnya suatu Ciptaan itu ada kaitannya dengan keterlibatan ekpresi personal Pencipta terhadap karya.

2. Keterlibatan Intelektual dan Ekspresi Personal Manusia terhadap Karya

George Wilhelm Frederich berpendapat bahwasanya perlindungan kekayaan intelektual harus didasasari oleh ciri khas pribadi Pencipta pada karya tersebut. Pendapat ini diperkuat oleh Hegel yang menyampaikan bahwa segala pengetahuan, pencapaian, dan karya dimiliki oleh pemikiran suatu individu yang sifatnya internal. Frasa "*khas dan pribadi*" dalam Pasal Angka 2 UU Hak Cipta membuktikan lekatnya seorang Pencipta dan karya ciptanya. Adanya frasa tersebut menimbulkan satu keraguan pada hasil karya AI karena tidak berasal dari pemikiran manusia sehingga hal ini menimbulkan peluang hilangnya hakikat perlindungan hak cipta pada hasil karya AI karena hilangnya esensi kerja keras terhadap karya yang dihasilkan. Maka dari itu, agar tidak bertentangan terhadap undang-undang, manusia harus memiliki peran yang dominan sejak masih berupa rancangan ide hingga realisasinya agar dapat memperolah perlindungan hak cipta atas karya yang telah dihasilkan.

3. Analisa mengenai Nilai Orisinalitas Karya

Aspek lain yang menentukan apakah suatu karya dapat dilindungi oleh hak cipta adalah keaslian/orisinalitas karya tersebut. Orisinalitas adalah sebuah kebaruan yang dimiliki oleh Pencipta atas karya tersebut. Aspek ini memperlihatkan bagaimana intervensi seseorang dalam prses pembuatan karya cipta. Dalam melakukan penilaian nilai keaslian suatu karya hasil AI, Uni Eropa melakukan tiga tahapan dalam menelaah hal tersebut. Tahapan tersebut antara lain (Bernt Hugenholtz dan Joa˜o Pedro Quintais, 2021):

a. Proses Pembuatan Karya

Dilakukan dengan menuangkan ide dan gagasan yang dimiliki oleh manusia. Proses perancangan atas suatu karya menunjukkan presentase peran berpikir Pencipta dalam karya yang akan dibuatnya. Hal itu dikarenakan sebuah ide atau gagasan yang dimilikinya menjadi dasar atau pondasi arah pembuatan karya tersebut.

b. Proses Pelaksanaan Pembuatan Karya

Proses realisasi ide dan gagasan yang sudah dilakukan dalam tahapan pertama. Tahap ini merupakan bentuk implementasi dari Pasal 41 UU Hak Cipta yang menjelaskan bahwa suatu ide tidak akan dilindungi oleh hak cipta jika belum diwujudkan dalam bentuk secara nyata. Tahap ini dipenuhi oleh segala bentuk tindakan Pencipta dalam membuat karya. Sehingga tahapan ini akan menujukkan

keterlibatan dominan Pencipta dan akan memberikan nilai orisinalitas karena tiap individu memiliki ciri khas dan pilihan pada karya tersebut.

c. Proses Penyusunan Karya

Tahapan ketiga ini merupakan tahapan finalisasi atas karya yang sudah dibuat. Sebagai contoh pada karya sastra, dalam proses finalisasi diperlukan *proof read* (baca ulang) atas karya yang sudah dibuat untuk dapat dilakukan perbaikan sehingga dapat mencerminkan pilihan kreatifnya dalam penyusunan karya tersebut.

Berdasarkan penjelasan ketiga tahapan diatas, peran manusia terhadap hasil AI hanya menerima *output* secara langsung karena seluruh pengerjaan dalam tiap proses penghasilan sebuah karya, AI bersifat mandiri dan berjalan sesuai dengan pengaturan program yang telah dirancang. Mengingat hakikat dari perlindungan hak cipta itu sendiri perlu adanya keterlibatan peran manusia atas suatu karya untuk menunjukkan adanya kerja keras, perjuangan, dan eksprresi pribadi di dalam karyanya. Maka dari itu, hasil karya AI jika ditinjau dalam UU Hak Cipta tidak mendapatkan perlindungan hak cipta karena secara yuridis bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan secara teoretis bertentangan dengan teori kekayaan intelektual. Dalam isu permasalahan ini, *European Parliament's Report on Intellectual Property Rights for the Development of Artificial Intelligence Technologies* juga merekomendasikan salah satu pendekatan yang berpusat pada manusia untuk AI dan mencatat bahwa penggunaan teknologi AI tidak boleh mengorbankan kepentingan manusia sebagai pencipta (European Parliament, 2020). Pada bulan April 2023, diadakan AI *Fashion Week* pertama kali di *New York City*. *Business of Fashion* (selanjutnya disebut BoF) Eropa mengomentari sulit untuk mengubah desain AI menjadi pakaian sungguhan. Sebagai contoh desain ikat pinggang yang dihasilkan oleh AI, BoF mengomentari bahwa AI tidak memahami bagaimana konsep ikat pinggang yang digunakan manusia. Sehingga desain yang dihasilkan AI masih tetap membutuhkan kurasi manusia untuk disempurnakan menjadi barang asli (Bain, 2023).

The Berne Convention juga mengharuskan karya yang dapat dilindungi merujuk pada perorangan (Härkönen, 2020). *The Berne Convention* menggunakan unsur teori kepribadian yang sangat anroposentris dimana teori ini memandang tindakan penciptaan sebagai ekspresi kepribadian pengarang. Program AI tidak memiliki kepribadian yang perlu dilindungi, sehingga hal ini bertentangan dengan upaya apapun untuk memberikan perlindungan hak cipta terhadap *output* yang dihasilkan oleh AI. *European Union Court of Justice* (selanjutnya disebut CJEU) dalam putusannya pada kasus *Eva Maria Painer v. Standard VergkaghsGnbH* tahun 2011 mencatat bahwa karya yang dilindungi hak cipta haruslah ciptaan intelekual penulisnya sendiri dimana penulis harus memberikan sentuhan peribadi agar mencerminkan keperibadian mereka (The European Union Court of Justice Case C-145/10, 2011). Selain itu, CJEU juga berfokus pada standar orisinalitas suatu karya, sehingga sulit untuk melihat bagaiman karya yang dihasilkan secara independen oleh AI akan memenuhi kriteria perlindungan hak cipta. Untuk memecahkan masalah ini, Eropa menggunakan hukum desain untuk menilai apakah hak kekayaan intelektual dapat menjadi alat yang cocok untuk melindungi hasil karya AI. Pengembangan regulasi hukum desain Uni Eropa terdiri dari dua regulasi yakni *Community Design Regulation* 6/2002 (selanjutnya disebut CDR) dan *The Design Directive* (selanjutnya disebut DD).

Konsep pengembangan desain yang diterapkan di Uni Eropa harus baru dan memiliki karakter tersendiri. Kedua kriteria ini adalah persyaratan objektif dalam arti bahwa mereka tidak mempertimbangkan pikiran atau motif subyektif dari perancang tetapi lebih berfokus pada karakteristik desain yang dihasilkannya untuk pengamatan dari luar (Estelle Derclaye ´Doceram, Cofemel and Brompton, 2020). Untuk menangani masalah ini, masalah utamanya bukanlah apakah perancangnya adalah manusia, melainkan kontribusi seperti apa yang dilakukan oleh perancang/pengguna dan bagaimana mengevaluasi kontribusi seperti apa yang cukup untuk membuat suatu karya AI dilindungi oleh hak cipta (Annette Kur, Marianne Levin & Jens Schovsbo, 2018). Hal tersebut diterapkan di Uni Eropa meskipun tingkat kreativitas diperlukan untuk suatu ciptaan, berdasarkan Pasal 6 ayat (2) CDR menilai karakter individu dinilai dari tingkat kebebasan perancang dalam pengembangan desain harus dipertimbangkan. Suatu karya desain atau lukisan yang dihasilkan oleh AI, dapat ditambahkan unsur kreativitas dari penciptanya sendiri untuk menyempurnakan hasil *algorithm* AI. Berdasarkan hal itu, tindakan pengembangan dapat dilihat sebagai suatu bentuk upaya intelektual dari seseorang. Dengan demikian, jika pengguna/perancang dapat mengembangkan hasil AI dengan suatu perbedaan kecil namun bersifat orisinil dan memiliki kebaharuan memiliki potensi untuk mendapatkan perlindungan hukum hak cipta. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini Uni Eropa melakukan pendekatan berbasis desain yang dikombinasikan dengan interpretasi kreativitas perancang. Mereka harus berkontribusi pada aspek visual dan kesan keseluruhan desain. Untuk dapat menentukan apakah suatu hasil karya AI dapat dilindungi oleh hak cipta, harus dinilai sejauh mana kontribusi pengguna terhadap penyempurnaan karya tersebut.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hukum nasional, AI tidak dapat dikatakan sebagai subjek hukum karena AI hanya menjalankan perintah dari manusia dan tidak dapat dipersonifikasikan sebagai manusia yang memiliki kecakapan hukum. BPPT menyampaikan bahwa segala sesuatu yang dapat dinyatakan sebagai subjek hukum atau tidak ditentukan oleh hukum yang berlaku. Begitu pula dengan AI, sama seperti subjek hukum lainnya bahwa hak dan kewajiban AI perlu diatur oleh norma hukum. Sedangkan saat ini belum ada norma hukum yang mengatur secara khusus mengenai AI itu sendiri. Akan tetapi, AI dapat disamakan dengan kedudukan badan hukum yang juga dinyatakan sebagai subjek hukum, karena perkembangan AI akan menciptakan suatu era yang berdampak besar bagi kehidupan manusia. Adanya perkembangan tersebut perlu mengadopsi teori hukum progresif Satjipto Raharjo dimana perkembangan AI menjadi salah satu contoh terobosan baru dari yang tidak logis menjadi logis, dan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sehingga, poin utama apakah kecerdasan buatan dapat menjadi subjek hukum bukanlah apakah AI dapat diberikan hak dan kewajiban, tetapi apakah AI harus diberikan hak dan kewajiban karena hal itu belum tentu sejalan dengan tujuan akhir dari kepentingan manusia dalam jangka panjang.
2. Terdapat tiga tahapan dalam menentukan legalitas hasil karya AI berdasarkan UU Hak Cipta diantaranya yakni: 1) analisa mengenai bentuk karya yang

diciptakan/dihasilkan, 2) analisa mengenai keterlibatan intelektual dan ekspresi personal manusia terhadap karya, dan 3) analisa mengenai nilai orisinalitas karya. Berdasarkan penjelasan ketiga tahapan diatas, peran manusia terhadap hasil AI hanya menerima *output* secara langsung karena seluruh pengerjaan dalam tiap proses penghasilan sebuah karya, AI bersifat mandiri dan berjalan sesuai dengan pengaturan program yang telah dirancang. Mengingat hakikat dari perlindungan hak cipta itu sendiri perlu adanya keterlibatan peran manusia atas suatu karya untuk menunjukkan adanya kerja keras, perjuangan, dan eksprresi pribadi di dalam karyanya. Maka dari itu, hasil karya AI jika ditinjau dalam UU Hak Cipta tidak mendapatkan perlindungan hak cipta karena secara yuridis bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan secara teoretis bertentangan dengan teori kekayaan intelektual

REFERENSI

Bernt Hugenholtz dan Joa˜o Pedro Quintais. (2021). Copyright and Artificial Creation: Does EU Copyright Law Protect AI-Assisted Output? *International Review of Intellectual Property and Competition Law*.

Agus Raharjo, Yusuf Saefudin, & Rini Fidiyani. (2018). The Influence of Technology Determinism in Forming Criminal Act of Legislation. *E3S Web of Conferences*, (p. 73).

Al-shamasneh, A., & Obaidellah, U. (2017). Artificial Intelligence Techniques for Cancer Detection and Classification: Review Study. *European Scientific Journal, 13*(03), 342-370.

Anggia Dasa Putri dan Dapit Pratama. (2017). , Sistem Pakar Mendeteksi Tindak Pidana Cybercrime Menggunakan Metode Forward Chaining Berbasis Web di Kota Batam. *Jurnal Edik Informatika, 3*(2), 199.

Annette Kur, Marianne Levin & Jens Schovsbo. (2018). *The EU Design Approach – a global appraisal.* Edward Elgar .

Antonius Cahyadi, E. Fernando M. Manullang. (2008). *Pengantar Ke Filsafat Hukum.* Jakarta: Kencana.

Apeldorn, V. (1981). *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta : Pradnya Paramitha.

Bain, M. (2023, April 26). *AI Is Really Good at Designing Knitwear (Belts, Not So Much).* Retrieved from Business of Fashion: https://www.businessoffashion.com/articles/technology/ai-is-really-good-at-designing-knitwear-belts-not-so-much/?utm_source=newsletter_technology&utm_medium=email&utm_campaign=Technology_260423&utm_content=intro

Bainbridge, D. I. (2005). *Intellectual Property, Fifth edition.* Pearson Longman.

Bambang, K. (2007). *Posisi dan Arti Penting HKI dalam Perdagangan Internasiona.* Jakarta.

Boggs, S. P. (2022, Januari 9). *The Proposed New EU Regulatory Regime for Artificial Intelligence (AI).* Retrieved from https://www.squirepattonboggs.com/-/media/files/insights/publications/2021/09/the-proposed-new-eu-regulatory-regime-for-artificial-intelligence-ai/theproposedneweuregulatoryregimeforaiv5.pdf

Budi Agus Riswandi, dkk. (2016). *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Cholik, C. A. (2021). Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi / ICT dalam Berbagai Bidang. *Jurnal Fakultas Teknik, 02*, 40.

CNN Indonesia. (2020). *Serangan Siber 2020 Makin Ngeri, Pakai Kecerdasan Buatan.* Jakarta: CNN Indonesia. Retrieved November 11, 2023, from https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191231140316-185-461320/serangan-siber-2020-makin-ngeri-pakai-kecerdasan-buatan

Damian, E. (2002). *Hukum Hak Cipta.* Bandung: Alumni.

Damian, E. (2014). *Hukum Hak Cipta, Edisi Keempat* (1st ed.). Bandung: Alumni.

Dewi, Sinta. (2016). Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum, 5*(1), 35-53. doi:https://doi.org/10.20961/

Djumhana Muhammad dan R. Djubaedillah. (2003). *Hak Milik Intelektual: Sejarah Teori dan Prateknya di Indonesia.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Djumhana, M. (2006). *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektua.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti .

Dreyer, K., & Allen, B. (2018). Artificial intelligence in health care: brave new world or golden opportunity? *Journal of the American College of Radiology, 15*(4), 655-657.

Dwivedi, dkk. (2021). Artificial Intelligence (AI): Multidisciplinary Perspectives on Emerging Challenges, Opportunities, and Agenda for Research, Practice and Policy. *International Journal of Information Management*, 57. doi:https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.08.002

Estelle Derclaye ´Doceram, Cofemel and Brompton. (2020). II design, l'innovazione tecnologica e digitale, Un dialogo interdisciplinare per un ripensamento delle tutele – Design, technological and digital innovation. Interdisciplinary proposals for reshaping legal protections. *ESI Press*, 2020. Retrieved from https://ssrn.com/abstract=3507802

European Comission . (2021, April 21). *Proposal for a Regulation laying down harmonised rules on artificial intelligence*. Retrieved from Official EU Website: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-regulation-laying-down-harmonised-rules-artificial-intelligence

European Commission. (2018b). *Factsheet: Artificial intelligence for Europe.* Retrieved from https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/factsheet-artificial-intelligence-eu-rope

European Commission. (2018c). *EU Member States sign up to cooperate on Artificial Intelligence.* Retrieved from https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-member-states-sign-cooperate-artificial-intelligence.

European Commission. (2018d). *Member States and Commission to work together to boost artificial intelligence 'made in Europe.* Retrieved from https://ec.europa.eu/commis-sion/presscorner/detail/en/IP_18_6689

European Commission. (2019). *Intellectual property rights for the development of artifcial intelligence technologies.*

European Commission. (2021). Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down harmonised rules on artifcial intelligence (Artifcial Intelligence Act) and amending certain Union

legislative acts. Retrieved September 24, 2023, from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52021PC0206

European Commission. . (2018a). *Artificial Intelligence for Europe.* Brussels: Europe Commission.

European Parliament. (2020, October 2). *Report on intellectual property rights for the development of artificial intelligence technologies (2020/2015(INI)) Committee on Legal Affairs.*

European Parliament. (2020). Resolution of 20 October 2020 on intellectual property rights for the development of artifcial intelligence technologies. Retrieved September 24, 2023, from https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0277_EN.html

European Parliament. (2020). Resolution of 20 October 2020 on intellectual property rights for the development of artifcial intelligence technologies (2019/2166(INI)). Retrieved from https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0277_EN.html

Fadhlurrahman, R. (2023). Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence sebagai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia . *Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau* .

Fuller, T., & Metz, C. (2018). *A.I. Is Helping Scientists Predict When and Where the Next Big Earthquake Will Be.* The New York Times. Retrieved September 28, 2023, from https://www.ny/times.com/2018/10/26/technology/earthquake-predictions-artificial-intelligence.html

Gema, A. J. (2022). Masalah Penggunaan Ciptaan Sebagai Data Masukan Dalam Pengembangan Artificial Intelligence Di Indonesia. *Technology And Economic Law Journal*, *1*(1).

González Otero, B. Q. (2018). *Before the Singularity: Copyright and the Challenges of Artificial Intelligence*. Retrieved September 21, 2023, from Kluwer Copyright Blog EU copyright, quo vadis.

Greenleaf, Graham. (2012). Global Data Privacy Laws: 89 Countries, and Accelerating. *Privacy Laws & Business International Report*, 1-13.

Guo, S. F. (2019). The Legal Construction of the Power Capacity of Artificial Intelligence "Electronic Human". *Gansu Social Science*(4), 108-116.

Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan Hukum Bagi rakyat Indonesia : Sebuah Studi Tentang PrinsipPrinsipnya Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan pembentukan peradilan Administrasi.* Surabaya : PT Bina Ilmu.

Haris Munandar dan Sally Sitanggang. (2008). *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten,Merek, dan Seluk-Beluknya.* Jakarta : Erlangga.

Härkönen, H. (2020). Fashion piracy and artificial intelligence–does the new creative environment come with new copyright issues? *Journal of Intellectual Property Law & Practice, 15*(3).

Harususilo, Y. E. (2018). *Presiden Jokowi: Penggunaan Teknologi Perlu Dibarengi Moral Tinggi.* Retrieved from

https://edukasi.kompas.com/read/2018/11/02/20214561/presiden-jokowi-penggunaan-teknologi-perlu

Hasibuan, O. (2014). *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights dan Collecting Society.* Bandung: Alumni.

Ihalainen, J. (2018). Computer creativity: artifcial intelligence and copyright. *Journal International Property Law Practice, 13*(9), 724-728.

Irfan Ihsan. (2023). *Penggunaan Teknologi "AI" Jadi Kontroversi, Seniman Digital Indonesia: Sesuatu yang Tak Bisa Dihindari.* Jakarta: VoA Indonesia. Retrieved November 16, 2023, from https://www.voaindonesia.com/a/penggunaan-teknologi-ai-jadi-kontroversi-seniman-digital-indonesia-sesuatu-yang-tak-bisa-dihindari/7071147.html

Itok Dwi Kurniawan dan Kristiyadi. (2022). Questioning the Existence of Artificial Intelligence as a Legal Subject in Indonesian National Law. *Jurnal Kewarganegaraan, 6*(4), 7307-7313.

Kadir, M. A. (2001). *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan. Intelektual.* Bandung : Citra Aditya.

Kansil, C. S. (2002). *Hak Milik Intelektual.* Jakarta: Jakarta Bumi Aksara.

Kartadjoemen, H. (1997). *GATT WTO dan Hasil Uruguay Round.* Jakarta: UI Press.

Kusumawardani, Q. a. (2019). Hukum Progresif dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan. *Jurnal Veritas et Justitia, 5*(1).

Kusumawati, R. (2008). Kecerdasan Buatan Manusia (Artificial Intelligence): Teknologi Impian Masa Depan. *Jurnal Ulul Albab: Jurnal Studi Islam, 09*(2).

Madiega, T. (2021). *Artificial Intelligence Act.* European Parliament: European Parliamentary Research Service.

Maffioli, D. R. (2023). Copyright in Generative AI training: Balancing Fair Use through Standardization and Transparency. *Duke University*. doi:10.13140/RG.2.2.18478.48961

Mahadi. (1981). *Hak Milik dalam Sistem Perdata Nasional.* Jakarta: BPHN.

Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi).* Jakarta: Prenada Media Group .

Mayssa Ahmad dan Mina Eshaq. (2023). Using Artificial Intelligence for enhancing Human Creativity. *Journal of Art, Design and Music, 2*(2). doi:https://doi.org/10.55554/2785-9649.1017

McCarthy, J. (2007). What is Artificial Intelligence? (p. 15). California: Stanford University .

Muhammad Tan Abdul Rahman Haris dan Tantimin. (2022). ,Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intellegent (AI) di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum, 8*(1). Retrieved from https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh

Oentoeng, S. (1999). *Hukum Kekayaan Intektual dan Alih Teknologi.* Salatiga: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.

Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum* (6st ed.). Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Ratna Puspita. (2021). *Edward Hiariej: Sulit Kategorikan AI sebagai Subjek Hukum.* Jakarta: News Republika. Retrieved November 30, 2023, from

https://news.republika.co.id/berita/r0ypr2428/edward-hiariej-sulit-kategorikan-ai-sebagai-subjek-hukum

Reto Hilty, Jorg Hoffman, dan Stefan Scheuerer. (2021). *Artificial Intelligence and Intellectual Property.* United Kingdom: Oxford University Press .

Rich, Elaine clan Kelvin Knight. (1991). *Artificial lnteligence.* New York : McGraw-Hill.

Riswand, B. A. (2016). *Doktrin Perlindungan Hak Cipta di Era Digital.* Yogyakarta: FH UII Press.

Roisah, K. (2015). *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Pengertian, dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa).* Malang: Setara Press.

Rouck, F. D. (2019). 'Moral rights & AI environments: the unique bond between intelligent agents and their creations. *Journal of Intellectual Property Law & Practice, 14*(4), 299-304.

Saidin, O. (2015). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights).* Jakarta: PT Rajawali Press.

Santoso, B. (2008). *Pengantar Hak kekayaan Intelektual.* Semarang : Pustaka Magister .

Sardjono, A. (2006). *Hak Kekayaan Intelektual Dan Pengetahuan Tradisional.* Bandung : Alumni.

Simorangkir, J. (1982). *Undang-Undang Hak Cipta* (Cetakan I ed.). Jakarta: Penerbit Djambatan.

Soelistyo, H. (2011). *Hak Cipta Tanpa Hak Moral.* Jakarta: Rajawali Pers.

Soemadiningrat, O. S. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa.* Bandung: PT Refika Aditama.

Sukarno Aburarea, dkk. (2013). *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik.* Jakarta: Prenada Media Group.

Sutedi, A. (2013). *Hak Atas Kekayaan Intelektual.* Jakarta: Sinar Grafika.

Suyud Margono dan Amir Angkasa. (2002). *Komersialisasi Intelektual (Aspek Hukum Biasa).* Jakarta: PT Gramedia Widya Sarana Indonesia.

Syamsuddin, M. (2012). *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group .

Teich, D., & Tirias Research. (2018). Management AI: Bias, Criminal Recidivism, And The Promise Of Machine Learning. *Forbes*. Retrieved from https://www/forbes.com/sites/tiriasresearch/2018/01/24/management-ai-bias-criminal-recidi- vism-and-the-promise-of-machine-learning/#4ec6a9547c8a

The European Union Court of Justice Case C-145/10. (2011). *Eva-Maria Painer v. Standard VergkagsGnbH.*

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa. (1991). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (cet. 1 ed.). Jakarta: Balai Pustaka.

Turing, A. (1950). *Computing Machinery and Intelligence*. Retrieved September 29, 2023, from Lix Mind, New Series: http://www.csee.umbc.edu/courses/471/papers/turing.pdf

World Intellectual Property Organization (WIPO) Copyright Treaty . (1988). Geneva.

Yamani, R. R. (2016). Pemikiran Prof Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia. *Skripsi, Program Sarjana Hukum UIN Alauddin Makassar*.

Yamashita, N. (2021). Economic crisis and innovation capacity of Japan: Evidence from cross-country patent citations. *Technovation, 101*. doi:https://doi.org/10.1016/j.technovation.2020.102208

Zhifeng Wen dan Deyi Tong. (2023). Analysis of the Legal Subject Status of Artificial Intelligence. *Beijing Law Review, 14*, 74-86. doi:https://doi.org/10.4236/blr.2023.141004

Zhuk, A. (2023). Navigating the legal landscape of AI copyright: a comparative analysis of EU, US, and Chinese approaches. *AI and Ethics*. doi:https://doi.org/10.1007/s43681-023-00299-0